



PENGUMUMAN

Nomor: Peng/ 21 /IX/KEP./2023

tentang

PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) POLRI
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RENCANA PENEMPATAN

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - e. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
 - g. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - h. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 158 Tahun 2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1197 Tahun 2021 tanggal 1 November 2021 Jabatan Fungsional yang dapat diduduki oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - i. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 544 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023;
 - j. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 tanggal 13 September 2023 tentang Penetapan Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
 - k. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 tanggal 13 September 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;

l. Keputusan

- l. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 653 Tahun 2023 tanggal 13 September 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Dosen Tahun Anggaran 2023;
 - m. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 654 Tahun 2023 tanggal 13 September 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023;
 - n. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/1245/IX/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Polri Tahun Anggaran 2023 Dan Rencana Penempatan;
 - o. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/521/M.SM.01.00/2023 tanggal 14 Maret 2023 perihal Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
 - p. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/2829/IV/KEP./2023/SSDM tanggal 6 April 2023 perihal pengiriman rencana kebutuhan PPPK Tenaga Kesehatan di lingkungan Polri Tahun Anggaran 2023;
 - q. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/3136/IV/KEP./2023/SSDM tanggal 26 April 2023 perihal pengiriman rencana kebutuhan PPPK Tahun Anggaran 2023;
 - r. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 8771/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 16 September 2023 perihal Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2023;
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberi kesempatan kepada Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Polri Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:
- a. jumlah Alokasi Formasi yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka pengadaan PPPK Polri Tahun Anggaran 2023 adalah sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) formasi dengan rincian:
 - 1) tenaga teknis sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) formasi;
 - 2) tenaga Kesehatan sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) formasi; dan
 - 3) tenaga Dosen/Lektor sebanyak 1 (satu) formasi.
 - b. jenis formasi Pengadaan PPPK Polri Tahun Anggaran 2023 meliputi:
 - 1) formasi khusus untuk pelamar dari Eks Tenaga Honorar Kategori II yang sudah terdata dalam database BKN dan Pegawai Non ASN/PHL Polri yang sudah bekerja di lingkungan Polri paling singkat 2 (dua) tahun;
 - 2) formasi umum untuk pelamar yang sudah memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan di lingkungan Polri paling singkat 2 (dua) tahun dan bekerja terus menerus yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kasatker/Kasatwil;

3) kewajiban

- 3) kewajiban instansi untuk mengalokasikan jenis kebutuhan formasi:
 - a) Tenaga Kesehatan sebanyak 80% untuk formasi khusus dan 20 % untuk formasi umum;
 - b) Tenaga Teknis sebanyak 80% untuk formasi khusus dan 20% untuk formasi umum;
- 4) rekap formasi berdasarkan jenis kebutuhan:
 - a) Tenaga Kesehatan sebanyak 94 formasi, untuk formasi khusus sebanyak 75 formasi dan untuk formasi umum sebanyak 19 formasi;
 - b) Tenaga Teknis sebanyak 256 formasi, untuk formasi khusus sebanyak 204 dan untuk formasi umum sebanyak 52 formasi;

Alokasi formasi sebagaimana tersebut angka 2. huruf a. di atas yang meliputi nama jabatan, kualifikasi Pendidikan, jumlah formasi dan penempatan tersebut dalam Lampiran "B" pengumuman ini.

c. Persyaratan pelamaran.

1) Persyaratan Umum.

- a) Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) sehat jasmani dan rohani;
- c) berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- d) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/POLRI;
- e) tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Anggota TNI/POLRI;
- f) tidak menjadi pengurus partai atau terlibat politik praktis dan menjadi pengurus atau anggota/simpatian organisasi terlarang di Indonesia.

2) Persyaratan Khusus.

- a) peserta/pelamar **jenis formasi khusus**, dengan ketentuan:
 - (1) Eks Tenaga Honorer Kategori II Polri yang sudah terdata dalam database BKN yang memiliki Nomor Registrasi *database* dan bekerja terus menerus yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kasatker/Kasatwil;
 - (2) Pegawai Non ASN/PHL yang sudah bekerja/mengabdikan di lingkungan Polri yang mempunyai pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun terus menerus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kasatker/Kasatwil;

3) memiliki

- (3) memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta terakreditasi dan program studi yang terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sedangkan untuk kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan/medis, dapat diperoleh dari Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAMPTKes)/Pusdiknakes/Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya pada saat ijazah tersebut dikeluarkan;
 - (4) usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada saat melamar sebagai PPPK;
 - (5) untuk jenis formasi khusus tenaga kesehatan harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku;
 - (6) untuk jenis formasi khusus Ahli Pertama Analisis Kebijakan pada Satker Spripim Polri, pelamar telah bekerja di lingkungan Spripim Polri paling singkat selama 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat SDM Spripim Polri;
 - (7) untuk jenis formasi khusus Dosen/Lektor sudah pernah bekerja di lingkungan Lemdiklat Polri yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat SDM di Lingkungan Lemdiklat Polri.
- b) peserta/pelamar **jenis formasi umum**, dengan ketentuan:
- (1) sudah memiliki pengalaman dibidang kerja yang relevan pada lingkungan Polri paling singkat 2 (dua) tahun dan bekerja secara terus menerus yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kasatker/Kasatwil;
 - (2) memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta terakreditasi dan program studi yang terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sedangkan untuk kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan/medis, dapat diperoleh dari Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAMPTKes)/Pusdiknakes/Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya pada saat ijazah tersebut dikeluarkan;
 - (3) usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada saat melamar sebagai PPPK;
 - (4) formasi tenaga kesehatan harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku.
- d. Tata cara pendaftaran.
- Pendaftaran dilaksanakan oleh pelamar secara *online* melalui <https://sscasn.bkn.go.id>, dengan tata cara sebagai berikut:
- 1) membuat akun di portal: <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - 2) mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor *HP* dan *email*;

3) mengisi

- 3) mengisi *password* akun SSCASN dan pertanyaan pengaman;
- 4) mengunggah pass foto maks 200kb dengan format JPG atau JPEG dan melakukan swafoto;
- 5) mencetak Kartu Informasi Akun;
- 6) *login* menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
- 7) *upload* foto *selfie* dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan tahap berikutnya;
- 8) melengkapi/mengisi biodata;
- 9) pilih instansi, jenis formasi dan jabatan dengan ketentuan pelamar hanya dapat memilih 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan;
- 10) *upload* dokumen pendukung meliputi:
 - a) pas foto dengan latar belakang warna merah;
 - b) KTP asli;
 - c) surat lamaran;
 - d) *file scan* ijazah asli;
 - e) *file scan* transkrip nilai;
 - f) dokumen lain:
 - (1) STR asli (bagi pelamar formasi Tenaga Kesehatan);
 - (2) sertifikat akreditasi BAN-PT/LAM-PTKes/Pusdiknakes/Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya;
 - (3) akta kelahiran asli;
 - (4) surat keterangan bekerja terus menerus paling sedikit 2 (dua) tahun yang ditandatangani Kasatker/Kasatwil;
 - (5) kontrak kerja/Kep/Sprin bekejra di lingkungan Polri.
- 11) memeriksa *form Resume* untuk memastikan semua data telah terisi dengan benar serta instansi, formasi dan jabatan yang dipilih sudah benar;
- 12) mengirim data dengan meng-klik sudahi pendaftaran yang telah dicek di resume dan pastikan bahwa data terisi dengan lengkap dan benar, data yang telah di-klik kirim tidak dapat diubah dengan alasan apapun;
- 13) mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2023 dan selanjutnya digunakan untuk verifikasi berkas administrasi;
- 14) batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen dimulai tanggal 20 September s.d. 9 Oktober 2023.

e. verifikasi

e. verifikasi/seleksi administrasi pendaftaran:

Pada saat melaksanakan verifikasi administrasi, **calon peserta harus hadir sendiri (tidak boleh diwakilkan) ke Panitia Daerah (Panda)/Polda sesuai lokasi formasi yang dilamar**, dengan membawa:

- 1) Kartu Pendaftaran SSCASN 2023;
- 2) surat lamaran yang ditujukan kepada Kapolri u.p. As SDM Kapolri di Jakarta, diketik dengan komputer, diberi E-materai Rp. 10.000,- yang dapat dibeli melalui distributor resmi:
 - a) PT. Peruri Digital Security: <https://e-meterai.co.id/>;
 - b) PT. Mitra Pajakku: <https://pajakku.e-meterai.co.id/>;
 - c) PT. Finnet Indonesia: <https://finnet.e-meterai.co.id/>;
 - d) PT. Mitracomm Ekasarana: <https://mitracomm.e-meterai.co.id/>;
 - e) PT. Koperasi Swadharma: <https://swadharma.e-meterai.co.id/>
- 3) ijazah asli dan 1 (satu) lembar fotokopi beserta transkrip nilai pendidikan umum terakhir yang digunakan untuk melamar, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat akreditasi BAN-PT/LAM-PTKes/Pusdiknakes yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 5) Surat Keterangan telah bekerja terus menerus dari Kasatker/Kasatwil pada saat pendaftaran;
- 6) fotokopi Kartu Nomor Registrasi *database*/ Kartu ujian tahun 2013/2014 (bagi Eks Tenaga Honorer Kategori II);
- 7) asli dan 1 (satu) lembar fotokopi Kontra Kerja/Kep/Sprin dengan keterangan bekerja sebagai Pegawai Non ASN Polri minimal 2 (dua) tahun;
- 8) KTP asli dan 1 (satu) lembar fotokopi;
- 9) Akta Kelahiran asli dan 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 10) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dan 1 (satu) lembar fotokopi dari Polres setempat yang masih berlaku;
- 11) Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Surat Keterangan Sehat Rohani dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas;
- 12) STR asli dan 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (dilengkapi oleh pelamar formasi tenaga kesehatan);
- 13) pasfoto terbaru dengan kemeja warna putih, ukuran 3 x 4 cm dengan latar belakang merah sebanyak 5 (lima) lembar;

- 14) asli 1 (satu) lembar surat pernyataan keterangan diri bermaterai Rp. 10.000,- yang berisi 5 (lima) butir pernyataan sebagai berikut:
 - a) tidak pernah pidana dengan pidana penjara/kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - b) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, Prajurit TNI, Anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta atau Pegawai lainnya antara lain Pegawai BUMN dan BMUD;
 - c) tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, PPPK, Prajurit TNI atau Anggota POLRI;
 - d) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, atau terlibat politik praktis;
 - e) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah.
 - 15) berkas administrasi yang akan diverifikasi agar dimasukkan ke dalam stofmap dan di tulis nama, kualifikasi pendidikan, jabatan yang dilamar dan nama Polda/Panda, dengan ketentuan:
 - a) stofmap warna kuning untuk pendidikan D-IV/S1/S2/S-3;
 - b) stofmap warna biru untuk pendidikan D3.
 - 16) pelamar yang dinyatakan lulus verifikasi administrasi dapat melanjutkan ketahapan seleksi selanjutnya.
- f. Tahapan seleksi:
- 1) seleksi administrasi dengan sistem gugur dan penilaian kualitatif dengan kriteria Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
 - 2) Seleksi Kompetensi (SK) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT), dengan materi dari Panselnas yang meliputi:
 - a) Kompetensi Teknis;
 - b) Kompetensi Manajerial;
 - c) Kompetensi Sosial Kultural;
 - d) Wawancara.
 - 3) Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) meliputi:
 - a) Tes Psikologi dengan materi dari Biro Psikologi SSDM Polri;
 - b) Tes Penelusuran Mental Kepribadian (PMK) dengan materi dari Briopaminal Divpropam Polri.

g. Sistem kelulusan

g. Sistem kelulusan.

1) Seleksi Administrasi:

- a) Seleksi administrasi dan pengecekan dokumen digital dilaksanakan oleh Panda/Polda setempat melalui aplikasi SSCASN BKN dan kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh Panitia Pusat melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://cpns.polri.go.id>;
- b) bagi pelamar yang dinyatakan lulus/memenuhi syarat seleksi administrasi, berhak mengikuti seleksi selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi.

2) Seleksi Kompetensi dan pembobotan:

- a) Seleksi Kompetensi (SK) menggunakan CAT BKN, dengan nilai kuantitatif dan diberi bobot 60%;
- b) Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) Instansi Polri terdiri dari:
 - (1) Tes Psikologi, menggunakan nilai kuantitatif dengan bobot 40% bersifat pemetaan;
 - (2) PMK menggunakan nilai kualitatif dengan kriteria Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

3) norma kelulusan:

a) untuk **jenis formasi khusus** dengan norma sebagai berikut:

- (1) mengikuti Seleksi Kompetensi (SK) dan memenuhi syarat nilai ambang batas Seleksi Kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT);
- (2) mengikuti tahapan SKTT meliputi Tes Psikologi yang bersifat pemetaan dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) pada Penelusuran Mental Kepribadian (PMK);
- (3) dalam hal penentuan kelulusan akhir diutamakan pelamar dari Eks Tenaga Honorer Kategori II yang telah memenuhi syarat nilai ambang batas Seleksi Kompetensi;
- (4) dalam hal formasi khusus tidak terpenuhi oleh pelamar Eks Tenaga Honorer Kategori II, sebagai bentuk optimalisasi pemenuhan kebutuhan PPPK, maka Pegawai Non ASN/PHL yang memenuhi syarat dengan ranking terbaik untuk menggantikan formasi tersebut;
- (5) rumus penelian jenis formasi khusus:

$$\text{Nilai Akhir Seleksi} = \frac{(\text{Nilai SK} \times 60) + (\text{Nilai SKTT} \times 40)}{100}$$

b) untuk **jenis formasi umum** dengan norma sebagai berikut:

- (1) mengikuti Seleksi Kompetensi (SK) dan memenuhi syarat nilai ambang batas SK sesuai ketentuan yang berlaku untuk mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT);

(2) mengikuti

- (2) mengikuti tahapan SKTT meliputi Tes Psikologi yang bersifat pemetaan dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) pada Penelusuran Mental Kepribadian (PMK);
- (3) kelulusan akhir berdasarkan perankingan hasil nilai SK dan SKTT;
- (4) rumus penilaian:

$$\text{Nilai Akhir Seleksi} = \frac{(\text{Nilai SK} \times 60) + (\text{Nilai SKTT} \times 40)}{100}$$

Keterangan:

- (1) Nilai SK = Nilai Seleksi Kompetensi;
- (2) Nilai SKTT = Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan.

h. Lain-lain.

- 1) waktu dan tempat pelaksanaan seleksi sebagai berikut:
 - a) waktu pelaksanaan seleksi sebagaimana tersebut dalam Lampiran "A" pada pengumuman ini;
 - b) tempat pelaksanaan verifikasi dan pemeriksaan administrasi dilaksanakan di Panda/Polda setempat secara digital melalui aplikasi SSCASN BKN;
 - c) tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi yang menggunakan CAT dilaksanakan di Kantor Regional (Kanreg)/Unit Pelayanan Teknis (UPT) BKN sebagaimana tersebut dalam Lampiran "C" pengumuman ini.
 - d) bagi peserta yang memilih formasi jabatan di Sespim Lemdiklat Polri dan Pusdik Intelkam Lemdiklat Polri, tempat pelaksanaan seleksi di Panda/Polda Jabar;
 - e) bagi peserta yang memilih formasi jabatan di Bareskrim Polri, Baintelkam Polri, Pusdokkes Polri, Divhumas Polri, Spripim Polri, Puskeu Polri, Yanma Polri, STIK Polri, Setukpa Lemdiklat Polri, tempat pelaksanaan seleksi di Panda/Polda Metro Jaya.
- 2) calon pelamar PPPK Polri Tahun Anggaran 2023 hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan;
- 3) kelulusan peserta seleksi PPPK Tahun Anggaran 2023 diutamakan untuk Eks Tenaga Honorer K-2 yang dinyatakan lulus seluruh tahapan seleksi;
- 4) terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, dinyatakan gugur;
- 5) apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan diterima tetapi belum ditetapkan Nomor Induk PPPK-nya kemudian mengundurkan diri/dibatalkan/digugurkan, maka Panitia Pusat dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat di bawahnya berdasarkan hasil seleksi;
- 6) apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir Pengadaan PPPK Polri Tahun 2023 dan di kemudian hari terbukti memberikan keterangan yang tidak sesuai/tidak benar, maka panitia dapat membatalkan kelulusan peserta yang bersangkutan serta dapat dilakukan proses hukum yang berlaku;

7) Peserta

- 7) peserta seleksi diharapkan selalu memantau perkembangan informasi yang diumumkan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://cpns.polri.go.id>;
 - 8) pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
 - 9) keputusan panitia seleksi tidak dapat diganggu gugat;
 - 10) layanan pengaduan, informasi yang berkaitan dengan proses Pengadaan PPPK Polri Tahun Anggaran 2023 dapat disampaikan melalui sosial media yang tertera pada *website* <https://cpns.polri.go.id> dan *WA* dengan nomor 085219688820.
3. Demikian untuk menjadikan maklum.

Dikeluarkan di: Jakarta

Pada tanggal : 15 September 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



AS SDM
Kab.
KARIBDALPRES

NURWORO DANANG, S.I.K.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

....., September 2023

Perihal: Lamaran jabatan

Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
u.p. As SDM Kapolri

di

Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Polri Tahun Anggaran 2023 untuk jabatan dengan rencana penempatan pada Polda

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. Kartu Pendaftaran SSCASN 2023;
2. surat lamaran yang ditujukan kepada Kapolri up. As SDM Kapolri di Jakarta, diketik dengan komputer, diberi E-materai Rp. 10.000,- yang dapat dibeli melalui distributor resmi:
 - a) PT. Peruri Digital Security: <https://e-meterai.co.id/>;
 - b) PT. Mitra Pajakku: <https://pajakku.e-meterai.co.id/>;
 - c) PT. Finnet Indonesia: <https://finnet.e-meterai.co.id/>;
 - d) PT. Mitracomm Ekasarana: <https://mitracomm.e-meterai.co.id/>;
 - e) PT. Koperasi Swadharma: <https://swadharma.e-meterai.co.id/>
3. ijazah asli dan 1 (satu) lembar fotokopi beserta transkrip nilai pendidikan umum terakhir yang digunakan untuk melamar, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat akreditasi BAN-PT/LAM-PTKes/Pusdiknakes yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. Surat Keterangan telah bekerja terus menerus dari Kasatker/Kasatwil pada saat pendaftaran;
6. fotokopi Kart Nomor Registrasi database/ Kartu ujian tahun 2013/2014 (bagi Eks Tenaga Honorer Kategori II);
7. asli dan 1 (satu) lembar fotokopi Kontra Kerja/Kep/Sprin dengan keterangan bekerja sebagai Pegawai Non ASN Polri minimal 2 (dua) tahun;
8. KTP asli dan 1 (satu) lembar fotokopi;
9. Akta Kelahiran asli dan 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dan 1 (satu) lembar fotokopi dari Poles setempat yang masih berlaku;
11. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Surat Keterangan Seat Rohani dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas;
12. STR asli dan 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (dilengkapi oleh pelamar formasi tenaga kesehatan);
13. pasfoto terbaru dengan kemeja warna putih, ukuran 3 × 4 cm dengan latar belakang merah sebanyak 5 (lima) lembar;

- f) asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai elektronik Rp 10.000,- yang berisi 5 (lima) butir pernyataan;
- g) Dokumen administrasi lainnya, apabila saya dinyatakan lulus akhir seleksi Pengadaan CPPPK Polri Tahun 2023.

Demikian permohonan ini saya buat, untuk menjadi maklum.

Hormat saya

E-Materai Rp. 10.000,-

.....

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Tempat/tanggal lahir :

Agama :

Alamat :

.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apabila saya:

1. tidak pernah dipidana dengan pidanan penjara/kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, Prajurit TNI, Anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta atau Pegawai lainnya antara lain Pegawai BUM dan BMUD;
3. tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri;
4. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, atau terlibat politik praktis;
5. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila pernyataan saya ini tidak benar.

....., September 2023

Yang membuat pernyataan

E- Materai Rp. 10.000,-

.....



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

LAMPIRAN "A" PENGUMUMAN KAPOLRI
NOMOR : PENG/ 21 /IX/KEP./2023
TANGGAL: 15 SEPTEMBER 2023

JADWAL SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
(PPPK) POLRI TAHUN 2023

No	Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1.	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023	
2.	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023	
3.	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023	
4.	Pelaksanaan penandatanganan pakta integritas Panitia dan Peserta Seleksi	12 Oktober 2023	
5.	Panda mengirimkan Keputusan Kapolda ttg kelulusan administrasi ke Panpus	13 Oktober 2023	
6.	Rapat wanjak penetapan hasil seleksi Administrasi Tk. Panpus	14 Oktober 2023	
7.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023	
8.	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023	
9.	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023	
10.	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023	
11.	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023	
12.	Penyerahan daftar nama peserta Seleksi Kompetensi ke BKN	29 Oktober 2023	
13.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023	Menyesuaikan jadwal dari BKN
14.	Panda melaksanakan koordinasi dgn BKN Pusat/Kanreg BKN, UPT BKN, tempat ujian	1 s.d. 6 November 2023	sda
15.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023	sda

17. Rapat

No	Kegiatan	Jadwal	Keterangan
17.	Rapat Tim Supervisi Seleksi Kompetensi Panpus ke Panda	7 November 2023	Menyesuaikan jadwal dari BKN
18.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 9 Desember 2023	sda
19.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan untuk Tes Psikologi	13 November s.d. 5 Desember 2023	sda
20.	Penelusuran Mental Kepribadian	13 November s.d. 4 Desember 2023	sda
21.	Panda mengirimkan Keputusan Kapolda ttg hasil Tes Psikologi dan PMK ke Panpus	5 Desember 2023	sda
22.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023	sda
23.	Pengumuman Kelulusan Akhir	4 s.d. 13 Desember 2023	sda
24.	Pemberkasan PPPK Polri: a. penyusunan dan pengiriman Kontrak Kerja b. pengiriman berkas administrasi digital c. pengisian DRH Nomor Induk (NI) PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024	sda
25.	Usul Penetapan NI PPPK	14 Januari s.d. 12 Februari 2024	sda
26.	Pengangkatan dan Penempatan PPPK Polri Tahun 2023	12 s.d. 16 Februari 2024	sda

Catatan:

Apabila terjadi perubahan jadwal akan diumumkan di <https://sscasn.bkn.go.id> atau di <http://cpns.polri.go.id>.

Dikeluarkan di: Jakarta

Pada tanggal :

15

September 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



NURWORO DANANG, S.I.K.
 BROGADIR JENDERAL POLISI

DAFTAR PERINCIAN FORMASI JABATAN PENGADAAN PPPK TAHUN ANGGARAN 2023

NO	POLDA	FORMASI JABATAN	KUALDIK	JUMLAH	UNIT KERJA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	POLDA ACEH	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH ACEH	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
2.	POLDA ACEH	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	2	POLIKLINIK BIDDOKKES POLDA ACEH	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
3.	POLDA ACEH	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	1	POLIKLINIK BIDDOKKES POLDA ACEH	UMUM
4.	POLDA SUMUT	AHLI PERTAMA-ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU KEPENDIDIKAN AGAMA ISLAM	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SUMUT	UMUM
5.	POLDA SUMUT	AHLI PERTAMA-PENYULUH HUKUM	S-1 HUKUM/ ILMU HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN	5	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SUMUT	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
6.	POLDA SUMUT	AHLI PERTAMA-PENYULUH HUKUM	S-1 HUKUM/ ILMU HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SUMUT	UMUM
7.	POLDA SUMUT	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1 EKONOMI/EKONOMI AKUNTASI/EKONOMI MANAJEMEN PERUSAHAAN/AKUNTANSI	3	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SUMUT	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN

1	2	3	4	5	6	7
8.	POLDA SUMUT	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1 EKONOMI/EKONOMI AKUNTANSI/EKONOMI MANAJEMEN PERUSAHAAN/AKUNTANSI	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SUMUT	UMUM
9.	POLDA SUMUT	TERAMPIL-ARSIPARIS	D-3 TEKNOLOGI MEKANIK INDUSTRI	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SUMUT	UMUM
10.	POLDA SUMUT	ASISTEN STATISTISI	D-3 MATEMATIKA	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SUMUT	UMUM
11.	POLDA SUMUT	TERAMPIL-PRANATA KOMPUTER	D-3 KOMPUTER INFORMATIKA/MANAJEMEN DAN INFROMATIKA KOMPUTER/MANAJEMEN INFORMATIKA	4	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SUMUT	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
12.	POLDA SUMUT	TERAMPIL-PRANATA KOMPUTER	D-3 KOMPUTER INFORMATIKA/MANAJEMEN DAN INFROMATIKA KOMPUTER/MANAJEMEN INFORMATIKA	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SUMUT	UMUM
13.	POLDA SUMUT	TERAMPIL-ARSIPARIS	D-3 KEUANGAN DAN PERBANKAN	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH KALTIM	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
14.	POLDA SUMUT	TERAMPIL-ARSIPARIS	D-3 A I P KETATALAKSANAAN PELAYARAN	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SULSEL	UMUM

1	2	3	4	5	6	7
15.	POLDA SUMUT	AHLI PERTAMA-PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI/SISTEM INFORMASI KOMPUTER/ILMU KOMPUTER	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SUMUT	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
16.	POLDA SUMUT	AHLI PERTAMA-PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI/SISTEM INFORMASI KOMPUTER/ILMU KOMPUTER	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SUMUT	UMUM
17.	POLDA SUMUT	AHLI PERTAMA-PENERJEMAH	S-1 SASTRA INGGRIS	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SUMUT	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
18.	POLDA SUMUT	AHLI PERTAMA-ANALIS KEBIJAKAN	S-1 PENDIDIKAN MANAJEMEN	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SUMUT	UMUM
19.	POLDA SUMUT	AHLI PERTAMA-ANALIS KEBIJAKAN	S-1 PENDIDIKAN BAHASA SATRA INDONESIA	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SUMUT	UMUM
20.	POLDA SUMUT	AHLI PERTAMA-ANALIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN/SOSIOLOGI/PSIKOLOGI	5	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SUMUT	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
21.	POLDA SUMUT	AHLI PERTAMA-ANALIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN/SOSIOLOGI/PSIKOLOGI	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SUMUT	UMUM
22.	POLDA SUMUT	AHLI PERTAMA-PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 MANAJEMEN EKONOMI	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SUMUT	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN

1	2	3	4	5	6	7
23.	POLDA SUMUT	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	1	KLINIK BIDDOKKES POLDA SUMUT	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
24.	POLDA SUMUT	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	1	KLINIK BIDDOKKES POLDA SUMUT	UMUM
25.	POLDA SUMBAR	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SUMBAR	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
26.	POLDA SUMBAR	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1 EKONOMI AKUNTANSI	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SUMBAR	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
27.	POLDA SUMBAR	AHLI PERTAMA-PENYULUH HUKUM	S-1 ILMU HUKUM	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SUMBAR	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
28.	POLDA SUMBAR	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	1	KLINIK POLDA SUMBAR	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
29.	POLDA SUMBAR	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	1	KLINIK POLDA SUMBAR	UMUM
30.	POLDA RIAU	AHLI PERTAMA-PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA/TEKNIK KOMPUTER	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH RIAU	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN

1	2	3	4	5	6	7
31.	POLDA RIAU	AHLI PERTAMA-ANALIS KEBIJAKAN	S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH RIAU	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
32.	POLDA RIAU	AHLI PERTAMA-ANALIS KEBIJAKAN	S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH RIAU	UMUM
33.	POLDA RIAU	AHLI PERTAMA-PENYULUH HUKUM	S-1 HUKUM	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH RIAU	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
34.	POLDA RIAU	AHLI PERTAMA-PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 EKONOMI MANAJEMEN	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH RIAU	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
35.	POLDA RIAU	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1 EKONOMI AKUNTANSI	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH RIAU	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
36.	POLDA RIAU	AHLI PERTAMA-ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI NEGARA/MANAJEMEN/SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI NEGARA/SOSIOLOGI	6	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH RIAU	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
37.	POLDA RIAU	AHLI PERTAMA-ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI NEGARA/MANAJEMEN/SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI NEGARA/SOSIOLOGI	3	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH RIAU	UMUM
38.	POLDA RIAU	TERAMPIL-ARSIPARIS	D-3 SEKRETARIS	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH NTB	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN

1	2	3	4	5	6	7
39.	POLDA RIAU	TERAMPIL-ARSIPARIS	D-3 PERTANIAN/PRODUKSI PERTANIAN	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH RIAU	UMUM
40.	POLDA RIAU	TERAMPIL-ARSIPARIS	D-3 MANAJEMEN	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH RIAU	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
41.	POLDA RIAU	TERAMPIL-ARSIPARIS	D-3 AKUNTANSI/ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN/KEUANGAN DAN PERBANKAN	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH RIAU	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
42.	POLDA RIAU	TERAMPIL-ARSIPARIS	D-3 AKUNTANSI/ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN/KEUANGAN DAN PERBANKAN	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH RIAU	UMUM
43.	POLDA RIAU	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	2	KLINIK PRATAMA BIDDOKKES POLDA RIAU	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
44.	POLDA KEPRI	AHLI PERTAMA- PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 MANAJEMEN EKONOMI	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH KEPRI	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
45.	POLDA KEPRI	AHLI PERTAMA- PERENCANA	S-1 EKONOMI	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH KEPRI	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
46.	POLDA KEPRI	AHLI PERTAMA- PERAWAT	PROFESI NERS, D-IV KEPERAWATAN	1	RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BATAM, POLDA KEPRI	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN

1	2	3	4	5	6	7
47.	POLDA KEPRI	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	1	RS BP BATAM, POLDA KEPRI	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
48.	POLDA KEPRI	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	2	RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BATAM POLDA KEPRI	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
49.	POLDA KEPRI	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	1	RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BATAM POLDA KEPRI	UMUM
50.	POLDA JAMBI	AHLI PERTAMA-ANALIS KEBIJAKAN	S-2 MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH JAMBI	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
51.	POLDA JAMBI	AHLI PERTAMA-ANALIS KEBIJAKAN	S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH JAMBI	UMUM
52.	POLDA JAMBI	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH JAMBI	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
53.	POLDA JAMBI	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH JAMBI	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
54.	POLDA JAMBI	AHLI PERTAMA-PENYULUH HUKUM	S-1 ILMU HUKUM	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH JAMBI	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN

1	2	3	4	5	6	7
55.	POLDA JAMBI	TERAMPIL-ARSIPARIS	D-3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH JAMBI	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
56.	POLDA JAMBI	TERAMPIL-ARSIPARIS	D-3 MANAJEMEN KEUANGAN	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH JAMBI	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
57.	POLDA JAMBI	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	2	KLINIK PRATAMA POLDA JAMBI	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
58.	POLDA SUMSEL	AHLI PERTAMA-ANALIS KEBIJAKAN	S-1 TEKNIK SIPIL	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SUMSEL	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
59.	POLDA SUMSEL	AHLI PERTAMA-PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI KOMPUTER	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SUMSEL	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
60.	POLDA SUMSEL	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN/ADMINISTRASI NEGARA/ILMU PEMERINTAH/ILMU ADMINISTRASI NEGARA	6	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SUMSEL	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
61.	POLDA SUMSEL	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN/ADMINISTRASI NEGARA/ILMU PEMERINTAH/ILMU ADMINISTRASI NEGARA	6	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SUMSEL	UMUM
62.	POLDA SUMSEL	AHLI PERTAMA-PENYULUH HUKUM	S-1 HUKUM/ILMU HUKUM	5	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SUMSEL	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN

1	2	3	4	5	6	7
63.	POLDA SUMSEL	AHLI PERTAMA- PENYULUH HUKUM	S-1 HUKUM/ILMU HUKUM	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SUMSEL	UMUM
64.	POLDA SUMSEL	AHLI PERTAMA- PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 EKONOMI MANAJEMEN	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SUMSEL	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
65.	POLDA SUMSEL	AHLI PERTAMA- PERENCANA	S-1 EKONOMI MANAJEMEN	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SUMSEL	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
66.	POLDA SUMSEL	TERAMPIL-PRANATA KOMPUTER	D-3 TEKNIK KOMPUTER	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SUMSEL	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
67.	POLDA SUMSEL	TERAMPIL-ARSIPARIS	D-3 MANAJEMEN PERUSAHAAN	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SUMSEL	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
68.	POLDA SUMSEL	TERAMPIL-ARSIPARIS	D-3 KEUANGAN DAN PERBANKAN	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SUMSEL	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
69.	POLDA SUMSEL	TERAMPIL - BIDAN	D-3 KEBIDANAN	1	POLIKLINIK MAPOLDA SUMSEL	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
70.	POLDA SUMSEL	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	1	POLIKLINIK MAPOLDA SUMSEL	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN

1	2	3	4	5	6	7
71.	POLDA BENGKULU	AHLI PERTAMA-PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
72.	POLDA BENGKULU	AHLI PERTAMA-ANALIS KEBIJAKAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
73.	POLDA BENGKULU	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1 EKONOMI AKUNTANSI	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
74.	POLDA BENGKULU	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	1	BIDDOKKES POLDA BENGKULU	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
75.	POLDA BENGKULU	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	1	BIDDOKKES POLDA BENGKULU	UMUM
76.	POLDA BENGKULU	TERAMPIL-RADIOGRAFER	D-3 RADIOLOGI	1	BIDDOKKES POLDA BENGKULU	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
77.	POLDA BABEL	AHLI PERTAMA-PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH BABEL	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
78.	POLDA BABEL	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1 MANAJEMEN KEUANGAN	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH BABEL	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN

1	2	3	4	5	6	7
79.	POLDA BABEL	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH BABEL	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
80.	POLDA BABEL	TERAMPIL-PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-3 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH BABEL	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
81.	POLDA BABEL	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	2	KLINIK BIDDOKKES POLDA KEP.BABEL	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
82.	POLDA LAMPUNG	AHLI PERTAMA-PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
83.	POLDA LAMPUNG	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN/ADMINISTRASI NEGARA	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
84.	POLDA LAMPUNG	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1 EKONOMI AKUNTANSI	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
85.	POLDA LAMPUNG	TERAMPIL-PRANATA KOMPUTER	D-3 MANAJEMEN INFORMATIKA	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
86.	POLDA LAMPUNG	TERAMPIL-ARSIPARIS	D-3 KOMPUTER AKUNTANSI	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN

1	2	3	4	5	6	7
87.	POLDA LAMPUNG	AHLI PERTAMA-PERAWAT	PROFESI NERS, D-IV KEPERAWATAN	1	KLINIK PRATAM BIDDOKKES POLDA LAMPUNG	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
88.	POLDA LAMPUNG	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	2	KLINIK PRATAMA BIDDOKKES POLDA LAMPUNG	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
89.	POLDA LAMPUNG	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	1	KLINIK PRATAMA BIDDOKKES POLDA LAMPUNG	UMUM
90.	POLDA METRO JAYA	AHLI PERTAMA-PRANATA KOMPUTER	S-1 KOMPUTER	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
91.	POLDA METRO JAYA	AHLI PERTAMA-PRANATA KOMPUTER	S-1 KOMPUTER	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA	UMUM
92.	POLDA METRO JAYA	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1 MANAJEMEN PERUSAHAAN/AKUNTANSI PERPAJAKAN	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
93.	POLDA METRO JAYA	TERAMPIL-ARSIPARIS	D-3 BAHASA INGGRIS	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
94.	POLDA METRO JAYA	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	2	KLINIK PRATAMA BIDDOKKES POLDA METRO JAYA, KEBAYORAN BARU	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN

95. POLDA

1	2	3	4	5	6	7
95.	POLDA METRO JAYA	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	1	KLINIK PRATAMA BIDDOKKES POLDA METRO JAYA, KEBAYORAN BARU	UMUM
96.	POLDA BANTEN	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN/ILMU ADMINISTRASI NEGARA	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH BANTEN	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
97.	POLDA BANTEN	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN/ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH BANTEN	UMUM
98.	POLDA BANTEN	AHLI PERTAMA-PENYULUH HUKUM	S-1 ILMU HUKUM	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH BANTEN	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
99.	POLDA BANTEN	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA/MANAJEMEN KEUANGAN	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH BANTEN	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
100.	POLDA BANTEN	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	1	RS BHAYANGKARA TK.IV BIDDOKKES POLDA BANTEN	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
101.	POLDA BANTEN	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	1	RS BHAYANGKARA TK.IV BIDDOKKES POLDA BANTEN	UMUM
102.	POLDA JABAR	AHLI PERTAMA-ANALIS KEBIJAKAN	S-1 PENDIDIKAN	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH JABAR	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN

1	2	3	4	5	6	7
103.	POLDA JABAR	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH JABAR	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
104.	POLDA JABAR	AHLI PERTAMA-PRANATA KOMPUTER	S-1 KOMPUTER MANAJEMEN INFORMATIKA	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH JABAR	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
105.	POLDA JABAR	AHLI PERTAMA-ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU POLITIK	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH JABAR	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
106.	POLDA JABAR	AHLI PERTAMA-PENYULUH HUKUM	S-1 HUKUM	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH JABAR	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
107.	POLDA JABAR	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1 EKONOMI AKUNTANSI/S-1 AKUNTANSI	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH JABAR	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
108.	POLDA JABAR	TERAMPIL-PRANATA KOMPUTER	D-3 MANAJEMEN INFORMATIKA	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH JABAR	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
109.	POLDA JABAR	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	2	KLINIK PRATAMA BIDDOKKES POLDA JABAR	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
110.	POLDA JABAR	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	1	KLINIK PRATAMA BIDDOKKES POLDA JABAR	UMUM

1	2	3	4	5	6	7
111.	POLDA JATENG	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1 MANAJEMEN PERUSAHAAN	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH JATENG	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
112.	POLDA JATENG	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH JATENG	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
113.	POLDA JATENG	AHLI PERTAMA-PENYULUH HUKUM	S-1 ILMU HUKUM	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH JATENG	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
114.	POLDA JATENG	TERAMPIL-ARSIPARIS	D-3 MANAJEMEN PERUSAHAAN	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH JATENG	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
115.	POLDA JATENG	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	2	RS BHAYANGKARA SEMARANG POLDA JATENG	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
116.	POLDA JATENG	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	2	RS BHAYANGKARA SEMARANG POLDA JATENG	UMUM
117.	POLDA DIY	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	2	BIDDOKKES POLDA DIY	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
118.	POLDA JATIM	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1 EKONOMI/EKONOMI MANAJEMEN/AKUNTANSI/ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN/EKONOMI PEMBANGUNAN	5	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH JATIM	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN

1	2	3	4	5	6	7
119.	POLDA JATIM	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1 EKONOMI/EKONOMI MANAJEMEN/AKUNTANSI/ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN/EKONOMI PEMBANGUNAN	3	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH JATIM	UMUM
120.	POLDA JATIM	AHLI PERTAMA-PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 EKONOMI MANAJEMEN	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH JATIM	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
121.	POLDA JATIM	AHLI PERTAMA-PENYULUH HUKUM	S-1 ILMU HUKUM	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH JATIM	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
122.	POLDA JATIM	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	4	RS BHAYANGKARA H.S SAMSOERI MERTOJOSO	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
123.	POLDA JATIM	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	1	RS BHAYANGKARA H.S. SAMSOERI MERTOJOSO	UMUM
124.	POLDA BALI	AHLI PERTAMA-ANALIS KEBIJAKAN	S-1 PENDIDIKAN AGAMA HINDU	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH BALI	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
125.	POLDA BALI	AHLI PERTAMA-PENYULUH HUKUM	S-1 HUKUM/ILMU HUKUM	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH BALI	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
126.	POLDA BALI	AHLI PERTAMA-PENYULUH HUKUM	S-1 HUKUM/ILMU HUKUM	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH BALI	UMUM

1	2	3	4	5	6	7
127.	POLDA BALI	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1 EKONOMI/EKONOMI MANAJEMEN	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH BALI	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
128.	POLDA BALI	AHLI PERTAMA-PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 EKONOMI MANAJEMEN	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH BALI	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
129.	POLDA BALI	AHLI PERTAMA-PENERJEMAH	S-1 BAHASA INGGRIS	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH BALI	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
130.	POLDA BALI	AHLI PERTAMA-ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH BALI	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
131.	POLDA BALI	TERAMPIL-PRANATA KOMPUTER	D-3 MANAJEMEN INFORMATIKA	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH BALI	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
132.	POLDA BALI	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	1	RS TRIJATA POLDA BALI	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
133.	POLDA BALI	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	1	RS TRIJATA POLDA BALI	UMUM
134.	POLDA NTB	AHLI PERTAMA-ANALIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN/ILMU PEMERINTAHAN/PSIKOLOGI BIMBINGAN KONSELING	3	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH NTB	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN

1	2	3	4	5	6	7
135.	POLDA NTB	AHLI PERTAMA-ANALIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN/ILMU PEMERINTAHAN/PSIKOLOGI BIMBINGAN KONSELING	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH NTB	UMUM
136.	POLDA NTB	AHLI PERTAMA-PENYULUH HUKUM	S-1 ILMU HUKUM/ILMU HUKUM PIDANA	4	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH NTB	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
137.	POLDA NTB	AHLI PERTAMA-PENYULUH HUKUM	S-1 ILMU HUKUM/ILMU HUKUM PIDANA	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH NTB	UMUM
138.	POLDA NTB	AHLI PERTAMA-ARSIPARIS	S-1 ILMU ADMINISTRASI	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH NTB	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
139.	POLDA NTB	AHLI PERTAMA-ARSIPARIS	S-1 ILMU ADMINISTRASI	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH NTB	UMUM
140.	POLDA NTB	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1 EKONOMI AKUNTANSI/MANAJEMEN KEUANGAN	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH NTB	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
141.	POLDA NTB	TERAMPIL-ARSIPARIS	D-3 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH NTB	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
142.	POLDA NTB	TERAMPIL-PRANATA KOMPUTER	D-3 MANAJEMEN INFORMATIKA	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH NTB	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN

1	2	3	4	5	6	7
143.	POLDA NTB	TERAMPIL-TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-3 KESEHATAN GIGI	1	BIDDOKKES POLDA NTB	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
144.	POLDA NTB	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	1	BIDDOKKES POLDA NTB	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
145.	POLDA NTB	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	1	BIDDOKKES POLDA NTB	UMUM
146.	POLDA NTT	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	2	TERATAI BRIMOB POLDA NTT	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
147.	POLDA KALBAR	AHLI PERTAMA-PENYULUH HUKUM	S-1 ILMU HUKUM PERDATA	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH KALBAR	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
148.	POLDA KALBAR	TERAMPIL-ARSIPARIS	D-3 MANAJEMEN PERKANTORAN	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH KALBAR	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
149.	POLDA KALBAR	TERAMPIL-PRANATA KOMPUTER	D-3 MANAJEMEN INFORMATIKA	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH KALBAR	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
150.	POLDA KALBAR	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	1	RS BHAYANGKARA PONTIANAK	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN

1	2	3	4	5	6	7
151.	POLDA KALBAR	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	1	RS BHAYANGKARA PONTIANAK	UMUM
152.	POLDA KALSEL	AHLI PERTAMA-ANALIS KEBIJAKAN	S-1 TARBIYAH	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH KALSEL	UMUM
153.	POLDA KALSEL	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH KALSEL	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
154.	POLDA KALSEL	AHLI PERTAMA-PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH KALSEL	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
155.	POLDA KALSEL	AHLI PERTAMA-PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 EKONOMI MANAJEMEN	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH KALSEL	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
156.	POLDA KALSEL	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1 AKUTANSI	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH KALSEL	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
157.	POLDA KALSEL	TERAMPIL-ARSIPARIS	D-3 ADMINISTRASI NEGARA	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH KALSEL	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
158.	POLDA KALSEL	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	2	RUMKIT BHAYANGKARA BANJARMASIN	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN

1	2	3	4	5	6	7
159.	POLDA KALSEL	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	1	RUMKIT BHAYANGKARA BANJARMASIN	UMUM
160.	POLDA KALTIM	AHLI PERTAMA- PRANATA KOMPUTER	S-1TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH KALTIM	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
161.	POLDA KALTIM	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	2	KLINIK SPN POLDA KALTIM	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
162.	POLDA KALTENG	AHLI PERTAMA- PRANATA KOMPUTER	S-1 KOMPUTER	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH KALTENG	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
163.	POLDA KALTENG	AHLI PERTAMA- PERAWAT	PROFESI NERS, D-IV KEPERAWATAN	2	RUMKIT BHAYANGKARA PALANGKA RAYA	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
164.	POLDA KALTARA	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	2	RS BHAYANGKARA TARAKAN POLDA KALTARA	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
165.	POLDA SULSEL	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-2 MAGISTER MANAJEMEN	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SULSEL	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
166.	POLDA SULSEL	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN/ADMINISTRASI PUBLIK	5	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SULSEL	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN

1	2	3	4	5	6	7
167.	POLDA SULSEL	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN/ADMINISTRASI PUBLIK	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SULSEL	UMUM
168.	POLDA SULSEL	AHLI PERTAMA-PENYULUH HUKUM	S-1 HUKUM	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SULSEL	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
169.	POLDA SULSEL	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1 EKONOMI/AKUNTANSI	3	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SULSEL	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
170.	POLDA SULSEL	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1 EKONOMI/AKUNTANSI	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SULSEL	UMUM
171.	POLDA SULSEL	AHLI PERTAMA-ANALIS KEBIJAKAN	S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SULSEL	UMUM
172.	POLDA SULSEL	AHLI PERTAMA-PENERJEMAH	S-1 PENDIDIKAN BHS INGGRIS	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SULSEL	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
173.	POLDA SULSEL	TERAMPIL-ARSIPARIS	D-3 SEKRETARIS	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SULSEL	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
174.	POLDA SULSEL	TERAMPIL-PRANATA KOMPUTER	D-3 MANAJEMEN INFORMATIKA	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SULSEL	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN

1	2	3	4	5	6	7
175.	POLDA SULSEL	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	2	POLIPOL BIDDOKKES POLDA SULSEL	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
176.	POLDA SULSEL	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	1	POLIPOL BIDDOKKES POLDA SULSEL	UMUM
177.	POLDA SULTENG	AHLI PERTAMA-ANALIS KEBIJAKAN	S-1 PERTANIAN	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SULTENG	UMUM
178.	POLDA SULTENG	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SULTENG	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
179.	POLDA SULTENG	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1 AKUNTANSI	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SULTENG	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
180.	POLDA SULTENG	AHLI PERTAMA-ANALIS KEBIJAKAN	S-1 PENDIDIKAN	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SULTENG	UMUM
181.	POLDA SULTENG	TERAMPIL-PRANATA KOMPUTER	D-3 MANAJEMEN INFORMATIKA	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SULTENG	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
182.	POLDA SULTENG	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	1	POLIKLINIK BIDDOKKES POLDA SULTENG	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN

1	2	3	4	5	6	7
183.	POLDA SULTENG	AHLI PERTAMA-DOKTER UMUM (PROFESI)	S-1 DOKTER UMUM (PROFESI)	1	POLIKLINIK BIDDOKKES POLDA SULTENG	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
184.	POLDA SULTENG	AHLI PERTAMA-DOKTER GIGI	S-1 DOKTER GIGI	1	POLIKLINIK BIDDOKKES POLDA SULTENG	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
185.	POLDA SULTRA	AHLI PERTAMA-PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM KOMPUTER	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SULTRA	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
186.	POLDA SULTRA	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SULTRA	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
187.	POLDA SULTRA	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1 EKONOMI AKUNTANSI/EKONOMI MANAJEMEN/EKONOMI MANAJEMEN KEUANGAN	5	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SULTRA	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
188.	POLDA SULTRA	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1 EKONOMI AKUNTANSI/EKONOMI MANAJEMEN/EKONOMI MANAJEMEN KEUANGAN	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SULTRA	UMUM
189.	POLDA SULTRA	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	1	RSU BHAYANGKARA KENDARI	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
190.	POLDA SULTRA	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	2	POLIKLINIK POLDA SULTRA	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN

1	2	3	4	5	6	7
191.	POLDA SULUT	AHLI PERTAMA-ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU KIMIA	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SULUT	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
192.	POLDA SULUT	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	2	RS BHAYANGKARA MANADO	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
193.	POLDA SULUT	TERAMPIL-PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-3 TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	1	RS BHAYANGKARA MANADO	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
194.	POLDA SULUT	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	1	RS BHAYANGKARA MANADO	UMUM
195.	POLDA SULBAR	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	2	RS BHAYANGKARA POLDA SULBAR	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
196.	POLDA GORONTALO	AHLI PERTAMA-ANALIS KEBIJAKAN	S-1 SOSIAL	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO	UMUM
197.	POLDA GORONTALO	AHLI PERTAMA-PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
198.	POLDA GORONTALO	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1 EKONOMI AKUNTANSI/EKONOMI MANAJEMEN	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN

1	2	3	4	5	6	7
199.	POLDA GORONTALO	TERAMPIL-PRANATA KOMPUTER	D-3 MANAJEMEN INFORMATIKA	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
200.	POLDA GORONTALO	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	2	RS BHAYANGKARA POLDA GORONTALO	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
201.	POLDA MALUKU	AHLI PERTAMA-ANALIS KEBIJAKAN	S-1 SOSIOLOGI	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH MALUKU	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
202.	POLDA MALUKU	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1 AKUNTANSI	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH MALUKU	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
203.	POLDA MALUKU	TERAMPIL-ARSIPARIS	D-3 SEKRETARIS	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH MALUKU	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
204.	POLDA MALUKU	TERAMPIL-ASISTEN APOTEKER	D-3 FARMASI	2	RS BHAYANGKARA AMBON POLDA MALUKU	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
205.	POLDA PAPUA	TERAMPIL-RADIOGRAFER	D-3 RADIOLOGI	2	RS BHAYANGKARA PAPUA POLDA PAPUA	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
206.	POLDA PAPUA BARAT	AHLI PERTAMA-DOKTER UMUM (PROFESI)	S-1 DOKTER UMUM (PROFESI)	2	RS BHAYANGKARA POLDA PAPUA BARAT LODEWIJK MANDACAN	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN

207. POLDA

1	2	3	4	5	6	7
207.	BARESKRIM POLRI	AHLI PERTAMA- PENYULUH HUKUM	S-2 HUKUM	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, BARESKRIM POLRI	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
208.	BARESKRIM POLRI	AHLI PERTAMA- PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 MANAJEMEN EKONOMI	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, BARESKRIM POLRI	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
209.	BARESKRIM POLRI	AHLI PERTAMA- PENYULUH HUKUM	S-1 HUKUM	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, BARESKRIM POLRI	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
210.	PUSDIK INTEL LEMDIKLAT POLRI	AHLI PERTAMA-ANALIS KEBIJAKAN	S-1 KIMIA	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, PUSDIK INTELKAM LEMDIKLAT POLRI	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
211.	SETUKPA LEMDIKLAT POLRI	AHLI PERTAMA-ANALIS KEBIJAKAN	S-1 PENDIDIKAN PPKN	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, SETUKPA LEMDIKLAT POLRI	UMUM
212.	BAINTELKAM POLRI	AHLI PERTAMA- PENYULUH HUKUM	S-1 ILMU HUKUM	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, BAINTELKAM POLRI	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
213.	BAINTELKAM POLRI	TERAMPIL-ARSIPARIS	D-3 SEKRETARIS	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, BAINTELKAM POLRI	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
214.	PUSDOKKES POLRI	AHLI PERTAMA-ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, PUSDOKKES POLRI	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN

1	2	3	4	5	6	7
215.	PUSDOKKES POLRI	AHLI PERTAMA- DOKTER GIGI	S-1 KEDOKTERAN GIGI	1	RS BHAYANGKARA TK.I R.SAID SUKANTO	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
216.	PUSDOKKES POLRI	AHLI PERTAMA- DOKTER UMUM (PROFESI)	S-1 DOKTER UMUM (PROFESI)	2	RS BHAYANGKARA TK.I R.SAID SUKANTO	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
217.	PUSDOKKES POLRI	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	1	RS BHAYANGKARA TK.I R.SAID SUKANTO	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
218.	PUSDOKKES POLRI	TERAMPIL-PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	1	RS BHAYANGKARA TK.I R.SAID SUKANTO	UMUM
219.	PUSDOKKES POLRI	TERAMPIL-ASISTEN APOTEKER	D-3 FARMASI	2	RS BHAYANGKARA TK.I R.SAID SUKANTO	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
220.	DIVHUMAS POLRI	AHLI PERTAMA- PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, DIVHUMAS POLRI	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
221.	SPRIPIM POLRI	AHLI PERTAMA-ANALIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN PERUSAHAAN/ BISNIS/ SUMBER DAYA MANUSIA	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, SPRIPIM POLRI	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN

1	2	3	4	5	6	7
222.	PUSKEU POLRI	AHLI PERTAMA- PERENCANA	S-1 EKONOMI AKUNTANSI	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, PUSKEU POLRI	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
223.	YANMA POLRI	AHLI PERTAMA-ANALIS KEBIJAKAN	S-1 KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, YANMA POLRI	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
224.	STIK POLRI	LEKTOR	S-3 ILMU MANAJEMEN/ MANAJEMEN	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, STIK POLRI	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
225.	SESPIM LEMDIKLAT POLRI	AHLI PERTAMA- PRANATA KOMPUTER	S-1 MANAJEMEN INFORMATIKA	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, SESPIM LEMDIKLAT POLRI	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
226.	SESPIM LEMDIKLAT POLRI	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN	2	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, SESPIM LEMDIKLAT POLRI	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
227.	SESPIM LEMDIKLAT POLRI	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, SESPIM LEMDIKLAT POLRI	UMUM

LAMPIRAN "B" PENGUMUMAN KAPOLRI
 NOMOR : PENG/ 21 /IX/2023
 TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2023

1	2	3	4	5	6	7
228.	SESPIM LEMDIKLAT POLRI	AHLI PERTAMA- PENYULUH HUKUM	S-1 HUKUM	1	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, SESPIM LEMDIKLAT POLRI	EKS TENAGA HONORER K-II/PEGAWAI NON ASN
JUMLAH SELURUHNYA				350		

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal: 15 September 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

AS SDM
 Karodipers

 NURWORO DANANG, S.I.K.
 BRIGADIR JENDERAL POLISI



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

LAMPIRAN "C" PENGUMUMAN KAPOLRI
NOMOR : PENG/ 21 /IX/KEP./2023
TANGGAL: 15 SEPTEMBER 2023

DAFTAR TEMPAT DAN LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI MENGGUNAKAN CAT BKN
PENGADAAN PPPK POLRI TAHUN ANGGARAN 2023

NO	POLDA	KANREG/UPT	ALAMAT
1	2	3	4
1.	POLDA ACEH	KANTOR REGIONAL XIII BKN ACEH	Jl. Mayor Jendral Sutoyo No.12, RT.4/RW.14, Cililitan, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13640
2.	POLDA SUMUT	KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN	Jl. Tahi Bonar Simatupang No.124, Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20127
3.	POLDA SUMBAR	UPT BKN PADANG	Batang Kabung Ganting, Koto Tangah, Padang City, West Sumatra 25586
4.	POLDA RIAU	KANTOR REGIONAL XII BKN PEKAN BARU	Jl. Hangtuah No.148, Sialang Sakti, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28131
5.	POLDA KEPRI	UPT BKN BATAM	Gedung Bersama Pemko, Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau
6.	POLDA JAMBI	UPT BKN JAMBI	Lorong Riska Tani No.90, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361
7.	POLDA BENGKULU	UPT BKN BENGKULU	Pematang Gubernur, Muara Bangka Hulu, Bengkulu City, Bengkulu 38119
8.	POLDA SUMSEL	KANTOR REGIONAL VII BKN PALEMBANG	Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30267
9.	POLDA KEP. BABEL	UPT BKN PANGKALPINANG	Jl. M Saleh Zainudin, Air Salemba, Kec. Gabek, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 33172

10. POLDA

1	2	3	4
10.	POLDA LAMPUNG	UPT BKN BANDAR LAMPUNG	Jl. Nusa Indah I No.02A, Sumur Batu, Kec. Tik. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35214
11.	POLDA BANTEN	UPT BKN SERANG	Jl. KH. Sochari No.40, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42117
12.	POLDA METRO JAYA	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	Jl. Mayjend . Sutoyo NO. 12 Cililitan Jakarta Timur 13640
13.	POLDA METRO JAYA	KANTOR REGIONAL V BKN JAKARTA	jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730
14.	POLDA JABAR	KANTOR REGIONAL III BKN BANDUNG	Jl. Surapati No.10, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
15.	POLDA JATENG	UPT BKN KABUPATEN SEMARANG	Jalan Soekarno Hatta KM. 29, Bergas, Kebonan, Randugunting, Kec. Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50552
16.	POLDA DIY	KANTOR REGIONAL I BKN YOGYAKARTA	Magelang St No.Km. 7,5, Jongke Tengah, Sendangadi, Mlati, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta 55285
17.	POLDA JATIM	KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA	jl. Letjend. S. Parman No.6, Krajan Kulon, Waru, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256
18.	POLDA BALI	KANTOR REGIONAL X BKN DENPASAR	Jl. Bypass Ngurah Rai No.646, Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80221
19.	POLDA KALBAR	UPT BKN PONTIANAK	Jl. Veteran No.29, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Sel., Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113
20.	POLDA KALSEL	KANTOR REGIONAL VIII BKN KALSEL	Jl. Bhayangkara No.1, Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 7071

1	2	3	4
21.	POLDA KALTARA	UPT BKN TARAKAN	depan Rusunawa, Jl. Kusuma Bangsa, Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara
22.	POLDA KALTIM	UPT BKN BALIKPAPAN	ex. Gedung Pertanahan. Samping Gedung Bank Indonesia Lama, Seberang Koramil, Jl. Marsma R. Iswahyudi No.40, Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
23.	POLDA KALTENG	UPT BKN PALANGKARAYA	Jl. W. Sudirohusodo No.20, Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874
24.	POLDA SULUT	KANTOR REGIONAL XI BKN MANADO	Jl. A.A. Maramis No.Km. 8, Paniki Bawah, Kec. Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara 95258
25.	POLDA SULSEL	KANTOR REGIONAL IV BKN MAKASSAR	Jl. Paccerakkang No.3, Paccerakkang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90241
26.	POLDA SULBAR	UPT BKN MAMUJU	8VC6+MHX, Jl. Martadinata, Simboro, Kec. Simboro Dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 91512
27.	POLDA SULTENG	UPT BKN DONGGALA - PALU	Jl. Bantilan No.20, Lere, Kec. Palu Bar., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111
28.	POLDA SULTRA	UPT BKN KENDARI	Jl. Sultan Hasanuddin No.63, Tipulu, Kec. Kendari Bar., Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93122
29.	POLDA NTB	UPTBKN MATARAM	Jl. Sandat No.3, Mataram Bar., Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83125
30.	POLDA NTT	UPT BKN KUPANG	Oesapa Barat, Kelapa Lima, Kupang City, East Nusa Tenggara
31.	POLDA GORONTALO	UPT BKN GORONTALO	Jl. H.D.I. Rachman, Hepuhulawa, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96214
32.	POLDA MALUKU	UPT BKN AMBON	Jl. A. I. S. Nasution No.8, Karang Panjang, Kel Amantelu, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku

LAMPIRAN "C" PENGUMUMAN KAPOLRI
 NOMOR : PENG/ 21 /IX/KEP./2023
 TANGGAL: 15 SEPTEMBER 2023

1	2	3	4
33.	POLDA MALUT	UPT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TERNATE	Q9GC+RPP, Jl. Jati Metro, Jati, Kec. Ternate Sel., Kota Ternate, Maluku Utara
34.	POLDA PAPUA	KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA	Jalan Baru Jl. Perkutut No.100/b, Wai Mhorock, Kec. Abepura, Kota Jayapura, Papua 99225
35.	POLDA PAPUA BARAT	UPT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SORONG	Jl. Tongkol, Klamasen, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Papua Bar. 98416

Ditetapkan di: Jakarta
 pada tanggal: 15 September 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



AS SDM
 u.b
 KORODALPERS
 NUDHORO DANANG, S.I.K.
 BRIGADIR JENDERAL POLISI